

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Telaah Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai ketahanan pangan telah cukup banyak dilakukan dan dipublikasikan. Hanya saja penelitian yang berhubungan dengan program lumbung pangan terhadap ketahanan pangan masih sangat sedikit sekali. Beberapa penelitian terdahulu tentang program lumbung pangan dan ketahanan pangan menjadi bahan acuan dan pembanding bagi peneliti. Berikut ini gambaran singkat mengenai hasil penelitian tersebut :

Indriati (2012) meneliti tentang “Ketahanan Pangan Rumah Tangga Dan Peningkatan Pendapatan Usahatani Padi Melalui Program Lumbung Pangan di Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang”. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan ketahanan pangan rumah tangga menyangkut komponen ketersediaan pangan, stabilitas pangan, aksesibilitas, dan kualitas pangan setelah ada Program Lumbung Pangan Desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Kelompok Tani “Tani Rasa” mampu berperan dalam mengelola kondisi ketahanan pangan rumah tangga menyangkut empat komponen yaitu ketersediaan pangan untuk seluruh anggota rumah tangga hingga waktu musim tanam berikutnya, stabilitas pangan dalam yang dilakukan adalah menjual sebagian hasil panen dan menyimpannya untuk kebutuhan pangan seluruh anggota keluarganya. Aksesibilitas pangan, dengan tetap menjaga dan merawat lahan pertanian yang dimiliki sendiri. Kualitas pangan, berbagai jenis olahan makanan yang dikonsumsi berupa adanya pengeluaran untuk lauk pauk berupa protein hewani dan nabati.

Penelitian lain dilakukan oleh Rahim (2012) tentang “Hubungan Antara Faktor Sosial Ekonomi Dan Partisipasi Petani Dalam Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi (Studi Kasus di Kelompok Tani Ngumpak, Desa Ngrandu Lor, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang) bertujuan mendeskripsikan kondisi faktor sosial ekonomi petani yang mengikuti program SL-PTT, Mendeskripsikan partisipasi petani dalam program SL-TPP.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah kondisi sosial ekonomi peserta yang mengikuti SL-TPP termasuk dalam kategori tinggi (93,12%) meliputi tingkat pendidikan sekolah dasar, kepemilikan luas lahan 0,5-1 ha, jenis pekerjaan mayoritas petani. Partisipasi petani dalam program, SL-TPP masuk dalam kategori tinggi (82,52%).

Penelitian lain dilakukan oleh Inggrida (2014) tentang “ Peranan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri ”. Tujuan dari penelitian adalah mendeskripsikan rancang bangun program kawasan rumah pangan lestari (KRPL) dan menganalisis peranan program kawasan rumah pangan lestari dalam meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga petani. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode studi kasus, sedangkan untuk menganalisis peranan KPRL dalam meningkatkan ketahanan pangan digunakan metode tabel skoring. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan rancang bangun KRPL dimulai dari tahap persiapan, pembentukan kelompok, sosialisasi, perencanaan kegiatan kerja, pelaksanaan, pembiayaan, monitoring dan evaluasi. Dalam rancang bangun yang paling mendominasi adalah tahap pelaksanaan, hal ini dikarenakan tahap tersebut dilaksanakan secara terorganisir. Peranan KRPL dalam meningkatkan ketahanan pangan adalah memberikan sumbangan berupa bibit tanaman, sayur, buah, dan unggas guna memenuhi kebutuhan pangan harian rumah tangga.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Indriati (2012) maka penelitian ini bisa menjadi acuan dalam menganalisis ketahanan pangan yang mencakup komponen ketahanan pangan. Untuk penelitian yang telah dilakukan oleh Rahim (2012) bisa dijadikan acuan dalam mendeskripsikan karakteristik sosial ekonomi petani yang mengikuti program lumbung pangan. Selanjutnya, pada penelitian Inggrida (2014) bisa dijadikan acuan dalam mengetahui peranan program lumbung pangan terhadap ketahanan pangan rumah tangga yaitu dengan yaitu dengan menganalisis data-data kualitatif untuk diinterpretasikan dan dijabarkan pada kajian analisa.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah penulis akan meneliti lebih dalam tentang peran program lumbung

pangan terhadap ketahanan pangan rumah tangga petani. Komponen ketahanan pangan rumah tangga yang akan dijadikan indikator ada tiga yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan rumah tangga petani. Penelitian ini dilakukan di Desa Bayemgede, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan pendekatan dan jenis penelitian yang sama, yaitu pendekatan kualitatif dan penelitian deskriptif.

2.2 Tinjauan Ketahanan Pangan

2.2.1 Ketahanan Pangan di Indonesia

Permasalahan ketahanan pangan telah menjadi isu yang sangat penting dan menjadi perhatian di dunia pada saat ini. Hal tersebut terbukti dari ketahanan pangan yang menjadi permasalahan utama dalam prioritas pembangunan Negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang relatif terus meningkat, sehingga ketersediaan pangan rakyat menjadi faktor penting dalam menjamin keberlangsungan hidupnya. Dalam upaya menjamin keberlangsungan hidup rakyat Indonesia pemenuhan akan kebutuhan pangan masyarakat menjadi hak dasar setiap manusia. Pemenuhan pangan merupakan prioritas utama yang ingin dicapai oleh daerah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan sebagai komitmen Indonesia dalam pembangunan pangan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau (Kementrian Pertanian, 2012).

Menurut Fathonah dan Supardjo (2012), tiga unsur pokok yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau memiliki pengertian sebagai berikut :

1. Ketersediaan Pangan : Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari produksi pangan sendiri dan membeli pangan yang tersedia di pasar atau tempat lain.

2. Akses Pangan (merata dan terjangkau) : Akses pangan terjamin bila rumah tangga dan individu di dalamnya memiliki sumberdaya yang cukup untuk mendapatkan pangan yang tepat dan bergizi.
3. Pemanfaatan Pangan : Penggunaan sifat biologi yang dimiliki pangan, kebutuhan akan konsumsi yang memberikan energi dan gizi esensial.

Konsep ketahanan pangan di Indonesia telah memasukkan aspek budaya yang tidak menyimpang dengan budaya masing-masing daerah yang berbeda-beda. Selain itu, aspek agama juga merupakan salah satu aspek ketahanan pangan di Indonesia.

2.2.2 Definisi Ketahanan Pangan

Pangan merupakan istilah yang teramat penting bagi pertanian, karena secara hakiki pangan merupakan kebutuhan paling dasar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama.

Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang pangan, mengartikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Pengertian mengenai ketahanan pangan tersebut mencakup aspek makro yaitu tersedianya pangan yang cukup dan sekaligus aspek mikro yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif. Pada tingkat nasional, ketahanan pangan diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman dan didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal.

Menurut Wahyudi (2013) ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk

menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya.

Ketahanan pangan merupakan sistem ekonomi pangan yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dan interaksi dari ketiga subsistem tersebut :

1. Subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara ekspor dan impor pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa, sehingga walaupun produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus tercukupi jumlah dan jenisnya, serta stabil penyediaanya dari waktu ke waktu.
2. Subsistem distribusi pangan mencakup aspek aksesibilitas secara fisik dan ekonomi atas pangan secara merata. Sistem distribusi bukan semata-mata mencakup aspek fisik dalam arti pangan yang tersedia di semua lokasi yang membutuhkan, tetapi juga menyangkut keterjangkauan ekonomi yang dicerminkan oleh harga dan daya beli masyarakat. Sistem distribusi ini perlu dikelola secara optimal dan tidak bertentangan dengan mekanisme pasar global agar tercapai efisiensi dalam proses pemerataan akses pangan bagi seluruh penduduk.
3. Subsistem konsumsi menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi dan kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal. Dalam subsistem konsumsi terdapat aspek penting lain, yaitu diversifikasi pangan yang merupakan suatu cara untuk memperoleh keragaman konsumsi zat gizi, sekaligus melepaskan ketergantungan masyarakat atas satu jenis pangan pokok tertentu yaitu beras. Ketergantungan yang tinggi tersebut dapat memicu instabilitas manakala pasokannya tergantung. Sebaliknya, agar masyarakat menyukai pangan alternatif

perlu ditingkatkan cita rasa, penampilan dan kepraktisan pengelolanya agar dapat bersaing dengan produk yang ada (Suryana, 2006).

Purwantini (2008), mendefinisikan ketahanan pangan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup, terdistribusikan dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari. Ketahanan pangan merupakan pilar bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Hal ini dipandang strategis karena tidak ada negara yang mampu membangun perekonomian tanpa menyelesaikan terlebih dahulu masalah pangannya. Di Indonesia, sektor pangan merupakan sektor penentu tingkat kesejahteraan karena sebagian besar penduduk yang bekerja on-farm untuk yang berada di daerah pedesaan dan untuk di daerah perkotaan, masih banyak juga penduduk yang menghabiskan pendapatannya untuk konsumsi. Memperhatikan hal tersebut, kemandirian pangan merupakan syarat mutlak bagi ketahanan nasional. Salah satu langkah strategis untuk untuk memelihara ketahanan nasional adalah melalui upaya mewujudkan kemandirian pangan. Secara konseptual, kemandirian adalah suatu kondisi tidak terdapat ketergantungan pada siapapun dan tidak ada satu pihak pun yang dapat mendikte atau memerintah dalam hal yang berkaitan dengan pangan.

Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan. Petani adalah produsen pangan dan petani adalah juga sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Disinilah perlu sekali peranan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan petani. Menurut Bastuti (2013) mengatakan bahwa definisi ketahanan pangan dari FAO (1996) dan UU RI No. 7 tahun 1996 tentang pangan, yang mengadopsi definisi dari FAO, ada 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu kecukupan ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan tanpa

fluktuasi. Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan dan kualitas/keamanan pangan.

Keempat komponen tersebut akan digunakan untuk mengukur ketahanan pangan di tingkat rumah tangga setiap penduduk. Keempat indikator ini merupakan indikator utama untuk mendapatkan indeks ketahanan pangan. Ukuran ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dihitung bertahap dengan cara menggabungkan keempat komponen indikator ketahanan pangan tersebut, untuk mendapatkan satu indeks ketahanan pangan.

Menurut Hanani (2009) konsep ketahanan pangan yang sempit meninjau sistem ketahanan pangan dari aspek masukan yaitu produksi dan penyediaan pangan. Seperti banyak diketahui, baik secara nasional maupun global, ketersediaan pangan yang melimpah melebihi kebutuhan pangan penduduk tidak menjamin bahwa seluruh penduduk terbebas dari kelaparan dan gizi kurang. Konsep ketahanan pangan yang luas bertolak pada tujuan akhir dari ketahanan pangan yaitu tingkat kesejahteraan manusia.

1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan dalam rumah tangga yang dipakai dalam pengukuran mengacu pada pangan yang cukup dan tersedia dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Penentuan jangka waktu ketersediaan makanan pokok di perdesaan biasanya dilihat dengan mempertimbangkan jarak antara musim tanam dengan musim tanam berikutnya (Suharjo, 1985) dalam Bastuti (2013). Perbedaan jenis makanan pokok yang dikonsumsi antara dua daerah membawa implikasi pada penggunaan ukuran yang berbeda, seperti di daerah dimana penduduknya mengonsumsi beras sebagai makanan pokok digunakan *cutting point* 240 hari sebagai batas untuk menentukan apakah suatu rumah tangga memiliki persediaan makanan pokok cukup/tidak cukup. Penetapan *cutting point* ini didasarkan pada panen padi yang dapat dilakukan selama 3 kali dalam 2 tahun.

Pada musim kemarau, dengan asumsi ada pengairan, penduduk dapat musim tanam gadu, yang berarti dapat panen 2 kali dalam setahun. Tahun berikutnya, berarti musim tanam rendeng, dimana penduduk hanya panen 1 kali setahun karena

pergantian giliran pengairan. Demikian berselang satu tahun penduduk dapat panen padi 2 kali setahun sehingga rata-rata dalam 2 tahun penduduk panen padi sebanyak 3 kali. Selain itu, di daerah dengan jenis makanan pokok jagung digunakan batas waktu selama 365 hari sebagai ukuran untuk menentukan apakah rumah tangga mempunyai ketersediaan pangan cukup/tidak cukup. Ini didasarkan pada masa panen jagung di daerah penelitian yang hanya dapat dipanen satu kali dalam tahun.

Disadari bahwa ukuran ketersediaan pangan yang mengacu pada jarak waktu antara satu musim panen dengan musim panen berikutnya hanya berlaku pada rumah tangga dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian pokok. Dengan kata lain, ukuran ketersediaan makanan pokok tersebut memiliki kelemahan jika diterapkan pada rumah tangga yang memiliki sumber penghasilan dari sektor non-pertanian. Dengan demikian kondisi ketersediaan pangan, dengan beras sebagai makanan pokok dapat diukur jika persediaan pangan rumah tangga > 240 hari, berarti persediaan pangan rumah tangga cukup. Lalu, jika persediaan pangan rumah tangga antara 1-239 hari, berarti persediaan pangan rumah tangga kurang cukup. Dan, jika rumah tangga tidak punya persediaan pangan, berarti persediaan pangan rumah tangga tidak cukup.

2. Akses dan Distribusi Kebutuhan Pangan

Akses dan distribusi merupakan salah satu aspek dalam ketahanan pangan. Akses yang dimaksud adalah cara untuk mendapatkan komoditas pangan mudah atau sulit. Indikator aksesibilitas/keterjangkauan dalam pengukuran ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dilihat dari kemudahan rumah tangga memperoleh pangan, yang diukur dari pemilikan lahan.

Menurut LIPI (2013) Akses yang diukur berdasarkan pemilikan lahan dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori:

- a. Akses langsung (*direct access*), jika rumah tangga memiliki lahan sawah/ladang
- b. Akses tidak langsung (*indirect access*) jika rumah tangga tidak memiliki lahan sawah/ladang.

Cara rumah tangga memperoleh pangan juga dikelompokkan dua kategori yaitu produksi sendiri dan membeli.

3. Stabilitas Ketersediaan Pangan

Stabilitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga diukur berdasarkan kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi makan anggota rumah tangga dalam sehari. Satu rumah tangga dikatakan memiliki stabilitas ketersediaan pangan jika mempunyai persediaan pangan diatas *cutting point* dan anggota rumah tangga dapat makan 3 (tiga) kali sehari sesuai dengan kebiasaan makan penduduk di daerah tersebut.

Dengan asumsi bahwa di daerah tertentu masyarakat mempunyai kebiasaan makan 3 (tiga) kali sehari, frekuensi makan sebenarnya dapat menggambarkan keberlanjutan ketersediaan pangan dalam rumah tangga. Dalam satu rumah tangga, salah satu cara untuk mempertahankan ketersediaan pangan dalam jangka waktu tertentu adalah dengan mengurangi frekuensi makan atau mengkombinasikan bahan makanan pokok (misal beras dengan ubi kayu).

Penggunaan frekuensi makan sebanyak 3 kali atau lebih sebagai indikator kecukupan makan didasarkan pada kondisi nyata di desa-desa, dimana rumah tangga yang memiliki persediaan makanan pokok 'cukup' pada umumnya makan sebanyak 3 kali per hari. Jika mayoritas rumah tangga di satu desa, misalnya, hanya makan dua kali per hari, kondisi ini semata-mata merupakan suatu strategi rumah tangga agar persediaan makanan pokok mereka tidak segera habis, karena dengan frekuensi makan tiga kali sehari, kebanyakan rumah tangga tidak bisa bertahan untuk tetap memiliki persediaan makanan pokok hingga panen berikutnya.

Beberapa ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung tiga unsur pokok yaitu "ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan", dimana unsur distribusi dan konsumsi merupakan penjabaran dari aksesibilitas masyarakat terhadap pangan. Salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses rumah tangga atau individu untuk memenuhi kebutuhannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih

dikatakan rapuh. Akses terhadap pangan, ketersediaan pangan dan resiko terhadap akses pangan tersebut merupakan determinan yang esensial dalam ketahanan pangan.

2.2.3 Definisi Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Ketahanan Pangan Rumah Tangga Sebagaimana hasil rumusan *International Congress of Nutrition (ICN)* yang diselenggarakan di Roma tahun 1992 mendefinisikan bahwa : “Ketahanan pangan rumah tangga (*Household food security*) adalah kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari”. Dalam sidang *Committee on World Food Security* 1995 definisi tersebut diperluas dengan menambah persyaratan “Harus diterima oleh budaya setempat”. Hal ini dinyatakan Hanani (2009) bahwa ketahanan pangan sampai pada tingkat rumah tangga antara lain tercermin oleh tersediannya pangan yang cukup dan merata pada setiap waktu dan terjangkau oleh masyarakat baik fisik maupun ekonomi serta tercapainya konsumsi pangan yang beraneka ragam, yang memenuhi syarat-syarat gizi yang diterima budaya setempat.

Ketahanan pangan suatu rumah tangga dapat terpenuhi jika masing-masing anggota dalam keluarga tersebut sudah merasa tercukupi dalam hal kebutuhan pangan dan kebutuhan gizi-gizi yang terkandung dalam suatu bahan pangan. Selain itu kerawanan pangan yang biasanya dihadapi oleh penduduk salah satunya diakibatkan oleh minimnya pendapatan yang dimiliki serta pengetahuan yang kurang tentang pangan dan kandungan gizinya. Biasanya masyarakat yang mengalami ketahanan pangan lebih banyak berada di daerah pedesaan daripada perkotaan, hal itu dikarenakan mayoritas masyarakat pedesaan memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sehingga untuk meminimalkan tingkat kerawanan tersebut, perlu adanya campur tangan pemerintah.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga (*Household food security*) merupakan kemampuan suatu rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggota keluarganya dari waktu ke waktu yang tercermin oleh tersediannya pangan yang cukup dan merata pada setiap waktu dan

terjangkau oleh baik fisik maupun ekonomi serta tercapainya konsumsi pangan yang beraneka ragam, agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari dan harus diterima oleh budaya setempat.

2.3 Tinjauan Lumbung Pangan

2.3.1 Sejarah Lumbung Pangan

Keberadaan lumbung padi sama tuanya dengan sejarah padi di Indonesia, karena lumbung merupakan tempat penyimpanan hasil panen dan tempat cadangan pangan sampai masa panen berikutnya. Awalnya lumbung pangan merupakan lumbung pribadi, dan sejalan dengan sifat sosial masyarakat yang menuntut adanya sistem cadangan pangan masyarakat berkembang lumbung masyarakat/ lumbung desa. Keberadaan lumbung di masyarakat mengalami pasang surut dan perannya terus berkembang disesuaikan dengan dinamika yang terjadi. Lumbung pangan tidak hanya berperan sebagai gudang pangan untuk mengatasi masalah kekurangan pangan pada masa paceklik dan kondisi bencana, tetapi juga berkembang menjadi kelembagaan pembiayaan yang melayani kebutuhan modal dan sarana produksi bagi masyarakat.

Istilah lumbung pangan sudah tidak asing lagi karena petani selalu menyimpan hasil pertaniannya (padi, jagung, dll) untuk kebutuhan pangan sampai kembali dalam satu musim, hal ini sebagai persediaan pangan. Akan tetapi saat ini istilah tersebut kembali muncul dihadapan para pemangku kebijakan pertanian berkaitan dengan rawannya ketahanan pangan dan persediaan pangan untuk masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena lahan pertanian yang semakin sempit untuk pembangunan-pembangunan dan adanya pertumbuhan penduduk yang setiap tahun meningkat. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan komunitas anggota lumbung, kelembagaan lumbung pangan harus mampu berperan tidak hanya berperan dalam menjalankan fungsi sosial tetapi juga menjalankan fungsi ekonomi bagi anggotanya (Rachmat, 2010).

2.3.2 Pengertian Lumbung Pangan

Lumbung adalah tempat penyimpanan hasil pertanian (umumnya padi), berbentuk rumah panggung dan ber dinding anyaman bambu. Sedangkan lumbung pangan adalah tempat atau bangunan yang berfungsi untuk menyimpan padi atau bahan makan untuk menghadapi masa paceklik. Lumbung pangan merupakan cadangan pangan yang berfungsi untuk menjaga stok atau stabilitas pangan baik karena musim paceklik atau karena ada kondisi darurat seperti bencana alam.

Lumbung pangan yang ada di masyarakat meliputi 3 macam diantaranya :

1. Lumbung individu yang digunakan sebagai tempat penyimpanan produksi individu rumah tangga yang memproduksi pangan (padi atau jagung), lumbung yang menyimpan stok bahan pangan rumah tangga periode tertentu (musiman, tahunan) . Pembangunan lumbung individu berada di dalam rumah atau rumah.
2. Lumbung kelompok, yaitu lumbung yang dibangun oleh kelompok masyarakat dengan tujuan mengatasi kerawanan pangan kelompok tertentu, dengan anggota kelompok masyarakat rawan pangan.
3. Lumbung desa, yaitu lumbung yang dibangun atas prakarsa aparat desa dalam mengatasi kerawanan pangan kelompok masyarakat desa. Pemerintah desa memfasilitasi dalam pendirian lumbung. Lumbung desa beranggotakan semua anggota masyarakat. Lumbung desa bisa dalam beberapa kelompok lumbung menurut dusun, umumnya lumbung desa masih bertahan di desa yang menghadapi kendala kerawanan pangan (Rachmat, 2010).

Istilah lumbung telah dikenal oleh masyarakat di beberapa daerah. Lumbung yang ada sering dikonotasikan sebagai lumbung paceklik. Lumbung paceklik tersebut dibentuk sebagai cadangan bagi petani di musim paceklik sehingga petani dapat meminjam gabah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Keberadaan lumbung pangan merupakan lembaga alternatif yang diupayakan dapat menggantikan peran kelembagaan lokal yang sekarang mengalami banyak kehancuran.

Lumbung pangan mempunyai fungsi sosial dan jika dikelola secara bersama, akan menumbuhkan rasa sosial di antara anggotanya, dan ini merupakan modal sosial bagi pembangunan. Dengan demikian perlu menumbuhkan lumbung pangan atau

meningkatkan fungsi lumbung yang telah ada, Keberadaan lumbung pangan diarahkan menuju lumbung desa sebagai sarana untuk pemupukan cadangan pangan masyarakat yang fungsinya adalah mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu.

2.3.3. Manfaat dan Tujuan dari Lumbung Pangan

1. Manfaat Lumbung Pangan

Dengan adanya lumbung pangan di desa-desa, paling tidak akan menimbulkan efek positif yang dapat dirasakan oleh petani diantaranya lumbung pangan sebagai media *food security* yang akan menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di desa. Sehingga masyarakat petani tidak perlu membeli beras yang rata-rata adalah beras impor. Selain itu, jatah raskin juga tidak perlu sampai ke desa-desa karena stok beras di desa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kemudian manfaat lain dari adanya lumbung pangan adalah terpenuhinya kebutuhan pangan di desa, masyarakat desa akan dapat memikirkan hal yang lain untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Misalnya menggalakkan peternakan sebagai penopang penguatan perekonomian desa atau melakukan kegiatan perekonomian lain sebagai sampingan selain kegiatan pertanian. Selain itu dengan adanya lumbung pangan, bisa digunakan sebagai sarana untuk melawan tengkulak yang ternyata malah seringkali merugikan masyarakat. Setiap musim panen walaupun pemerintah telah menetapkan harga padi, namun kenyataannya petani tetap tidak berdaya menghadapi para tengkulak. Petani harus tetap mengikuti harga yang ditetapkan para tengkulak yang rata-rata lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan pemerintah. Lalu ketika hasil panen padi masyarakat petani desa telah jatuh ketangan tengkulak, mengakibatkan menipisnya stok pangan khususnya beras di desa, Sehingga masyarakat desa harus menggantungkan kebutuhannya pada kucuran jatah raskin yang kualitasnya perlu dipertanyakan.

2. Tujuan Lumbung Pangan

Tujuan yang dijalankan oleh lumbung pangan ada 6 yaitu menampung surplus produksi pangan pedesaan pada saat panen, melayani kebutuhan pangan pedesaan pada musim paceklik, melakukan simulasi pemupukan modal melalui iuran dalam bentuk bahan pangan maupun tunai, membantu petani yang kesulitan modal usaha dengan cara menyediakan alternatif kredit mikro bagi warga komunitas sehingga warga terhindar dari praktek-praktek bank harian dari para pengijon, menghindari petani dari kerugian penjualan dini atas produksi usaha tani untuk memenuhi kebutuhan mendesak, serta menghindarkan petani untuk membeli bahan pangan pokok dengan harga tinggi pada musim paceklik (Rachmat, 2010).

2.3.4 Sasaran dan Keluaran Program Lumbung Pangan Desa

Sasaran yang ingin dicapai melalui pengembangan lumbung pangan adalah :

- a. Berkembangnya kemampuan manajemen lumbung.
- b. Berkembangnya lumbung pangan kearah usaha berbasis lumbung pangan ekonomi pedesaan.
- c. Berkembangnya lumbung pangan masyarakat menjadi lembaga usaha untuk memantapkan ketersediaan pangan didaerah rawan pangan khususnya pada saat paceklik.

2.3.5 Persyaratan Penerimaan Dana Bergulir Untuk Pembangunan Lumbung

Penerimaan dana program lumbung pangan desa harus memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan penerimaan dana bergulir atau bantuan fisik lumbung pangan desa adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok bergerak dibidang lumbung pangan desa dan minimal berdiri selama dua tahun yang dibuktikan dengan surat pengukuhan pendirian kelompok dari Kepala Badan/Dinas/Desa/Kelurahan daerah lokasi
- b. Kelompok mempunyai kepengurusan yang jelas dengan jumlah anggota minimal sepuluh orang dan maksimal dua puluh orang dibuktikan dengan surat pengukuhan pendirian dari Kepala Badan/Dinas/Desa/Kelurahan daerah lokasi

- c. Mempunyai modal awal yang dibuktikan dalam bentuk tabungan/fisik bahan pangan
- d. Dapat dipercaya dan mampu mengembangkan usahanya.
- e. Kelompok/ketua kelompok tidak sedang bermasalah dengan sumber modal lainnya atau perbankan.
- f. Kelompok tidak sedang menerima bantuan peminjaman untuk kegiatan sejenis yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
- g. Kelompok mampu menyediakan agunan sesuai dengan ketentuan berlaku
- h. Bersedia mengikuti aturan-aturan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis

2.3.6 Pemanfaatan Dana Bergulir

Pemanfaatan pengembangan dana bergulir program lumbung pangan desa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk membeli gabah, beras, jagung, kedelai dan atau bahan pangan lain sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.
- b. Dapat digunakan untuk penyediaan saprodi guna mendukung keberhasilan budidaya dengan sistem pembayaran setelah panen
- c. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan simpan pinjam dalam bentuk uang.

Dalam pelaksanaannya juga ada langkah-langkah untuk perkembangan lumbung pangan desa yang harus dilakukan oleh kelompok itu sendiri seperti berikut :

- a. perlu adanya kekompakkan atau kemauan dari kelompok untuk merasa memiliki keberadaan lumbung
- b. diharapkan kelompok tidak mengandalkan bantuan karena hanya bersifat simultan
- c. motor dari berkembangnya lumbung adalah ketua kelompok sehingga dapat memotivasi anggotanya
- d. perlu adanya kebersamaan dan keterbukaan diantara pengurus kelompok dan anggotanya.

2.3.7 Kegiatan Lumbung Pangan Desa

Kegiatan yang dilakukan dalam lumbung pangan desa yaitu :

a. Pemantauan

Pemantauan adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana. Sekertariat dana bergulir wajib melakukan pemantauan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pemanfaatan dana bergulir.

b. Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. lembaga/kelompok penerima dana bergulir wajib mengirimkan laporan ke Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh
2. Bank Jatim wajib setiap bulan melaporkan perkembangan penyalura dan penerimaan kembali dan bergulir yang disalurkan berdasarkan jenis dana bergulir dan melampirkan rekening Koran setiap akhir bulan.
3. Sekertariat dana bergulir wajib melaporkan kegiatannya kepada Gubernur Jawa Timur melalui POKJA Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur berdasarkan laporan Bank Jatim.

2.4 Tinjauan Tentang Sosial Ekonomi

Faktor-faktor yang ikut menentukan partisipasi masyarakat dalam program lumbung pangan antara lain tingkat usia, pendidikan, jumlah keluarga dan pendapatan keluarga. Berdasarkan teori klasik ini, maka keluarga bisa dikatakan lebih sejahtera bila persentasi pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dari persentasi pengeluaran untuk bukan makanan. Artinya proporsi alokasi pengeluaran untuk pangan akan semakin kecil dengan bertambahnya pendapatan keluarga, karena sebagian besar dari pendapatan tersebut dialokasikan pada kebutuhan non pangan. Jumlah anggota keluarga atau ukuran keluarga juga mempengaruhi tingkat konsumsi pangan rumah tangga. Selebihnya, keluarga akan mengalokasikan sisa pendapatannya untuk konsumsi bukan makanan. Dengan demikian, keluarga dengan jumlah anggota sedikit relatif lebih sejahtera daripada keluarga dengan jumlah anggota besar.

Selain jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan formal kepala keluarga juga berpengaruh terhadap konsumsi pangan keluarga. Pendidikan dapat merubah

sikap dan perilaku seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin mudah menerima informasi dan inovasi baru yang dapat merubah tingat konsumsi pangannya. Disamping itu makan tinggi tingkat pendidikan formal maka kemungkinannya akan mempunyai tingkat pendapatan yang relatif tinggi (Sumarwan, 2011). Perubahan karakteristik keluarga ini mempunyai dampak sangat penting pada perubahan pola kebutuhan atau konsumsi pangan keluarga misalnya makanan perlengkapan alat-alat rumah tangga, pelayanan kesehatan, perumahan dan pendidikan.

2.4.1 Usia

Usia berkaitan erat dengan sikap seseorang dalam mengambil sebuah keputusan seperti anggapan yang berlaku di masyarakat, dimana semakin dewasa usia seseorang maka akan semakin matang pula orang tersebut dalam menentukan sikap dan keputusannya dengan asumsi bahwa semakin tua usia seseorang maka pengalaman hidup yang dimilikinya akan lebih banyak, sehingga akan lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan bila dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Demikian pula dengan pengambilan keputusan mengenai konsumsi rumah tangga, orang yang usianya lebih tua akan lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi kebutuhannya jika dibandingkan dengan orang yang usianya lebih muda. Kebanyakan orang yang lebih muda masih memperhatikan kesenangannya dalam mengkonsumsi makanan daripada kebutuhan pokoknya, sedangkan mereka yang lebih tua akan lebih berpengalaman dalam mengatur pola konsumsi pangannya terutama untuk kebutuhan pokoknya dan peningkatan gizi keluarga. Dengan demikian umur seseorang akan mempengaruhi tingkat kedewasaannya atau tingkat kematangannya dalam mengkonsumsi makanan (Soerjani, 1987).

2.4.2 Pendidikan

Investasi sumber daya manusia bukan merupakan tanggungan jawab salah satu sektor pembangunan tetap bersifat multisektor seperti pendidikan, kesehatan, program kependudukan dan lain-lain. Namun demikian, diantara berbagai bentuk

investasi sumber daya manusia tersebut, pendidikan dapat dikatakan sebagai katalisator utama pengembangan sumber daya manusia, dengan asumsi bahwa semakin terdidik seseorang, semakin tinggi pula kesadarannya terhadap pembentukan keluarag sejahtera.

Pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seseuai dengan amanat yang telah dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut merupakan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk mencanangkan program wajib belajar. Program wajib belajar tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Program pendidikan tidak selamanya harus terselenggara di lingkungan sekolah, tetapi juga pendidikan berkelanjutan seperti kursus-kursus, pelatihan kerja, pendidikan dalam jabatan dan sejenisnya (Suryadi, 2007).

2.4.3 Jumlah Anggota Keluarga

Keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rumah tangga. Dalam suatu rumah tangga biasanya dikepalai oleh seorang kepala rumah tangga, yaitu orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga tersebut, atau orang yang ditunjuk dan ditaukan sebagai kepala rumah tangga. Selain kepala rumah tangga terdapat pula anggota rumah tangga yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan kepala rumah tangga seperti istri, anak, menantu, cucu, orang tua, mertua, famili dan lain-lain. Besarnya rumah tangga menyatakan jumlah seluruh anggota yang menjadi tanggungan dalam rumah tangga tersebut. Besaran rumah tangga dapat memberikan indikasi beban rumah tangga. Semakin tinggi besaran rumah tangga berarti semakin banyak anggota rumah tangga yang selanjutnya semakin berat beban rumah tangga tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, terutama untuk rumah tangga dengan tingkat pendapatan rendah.

Kebutuhan anggota keluarga akan makanan berbeda-beda tergantung dari struktur umur. Menurut Sediaoetama (2008), distribusi kebutuhan pangan dalam keluarga tidak merata, artinya setiap anggota keluarga tersebut mendpaat jumlah

makanan yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya, menurut umur dan keadaan fisiknya. Zat gizi yang diperlukan oleh anak-anak dan anggota keluarga yang masih muda pada umumnya lebih tinggi dari kebutuhan orang dewasa, tetapi kalau dinyatakan dalam kuantum absolut, anak-anak tentu membutuhkan kuantum makanan yang lebih kecil dibandingkan dengan kuantum makanan yang diperlukan orang dewasa.

2.4.4 Pendapatan

Untuk komoditas pangan, peningkatan pendapatan tidak diikuti dengan peningkatan permintaan progresif. Berdasarkan hal tersebut dan dengan asumsi harga pangan yang dibayar rumah tangga adalah sama, maka menurut Hukum Engel pangsa pengeluaran pangan terhadap pengeluaran rumah tangga akan semakin berkurang dengan meningkatnya pendapatan.

Menurut Joesron dan Fathorrozi (2003), kebutuhan manusia relatif tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya akan berusaha memilih alternatif yang paling menguntungkan bagi dirinya. Lebih lanjut ia katakan bahwa timbulnya perilaku konsumen karena adanya keinginan memperoleh kepuasan yang maksimal dengan berusaha mengkonsumsi barang dan jasa sebanyak-banyaknya, tetapi mempunyai keterbatasan pendapatan.

2.5 Skala Likert

Menurut Bagus (2013) skala likert disebut juga summated rating scale. Skala likert merupakan skala yang mengukur kesetujuan atau ketidaksetujuan seseorang terhadap serangkaian pernyataan berkaitan dengan keyakinan atau perilaku mengenai suatu obyek tertentu. Sebenarnya skala likert merupakan skala ordinal akan tetapi dalam penelitian-penelitian bisnis khususnya pemasaran seringkali dimodifikasi dan diasumsikan sebagai skala interval. Biasanya format skala likert merupakan perpaduan antara kesetujuan dan ketidaksetujuan, skala ini dikembangkan oleh Rensis Likert sehingga dikenal dengan skala likert.

Skala ini banyak digunakan karena memberi peluang kepada responden untuk mengekspresikan perasaan mereka dalam persetujuan terhadap pernyataan-pernyataan yang diberikan berjenjang, mulai dari tingkat terendah sampai tertinggi. Jumlah pilihan jawabannya bisa tiga, lima, tujuh, sembilan, yang jelas harus ganjil. Semakin banyak pilihannya, semakin mewakili jawaban responden. Namun, semakin banyak pilihan jawaban, semakin sulit mencari kata-kata yang dapat dipahami secara umum. Skala likert dapat dipakai dengan beberapa variasi bentuk pertanyaan. Karena pilihan jawabannya berjenjang, setiap pilihan jawaban bisa diberi skor. Skor 1 bisa ditempatkan pada jenjang jawaban terendah, misalnya 'sangat tidak setuju', bisa pula pada jenjang jawaban tertinggi, misalnya 'sangat setuju', asal dilakukan secara konsisten.

Sedangkan menurut Safrizal (2011) Skala likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu gejala atau fenomena pendidikan. Dalam skala likert terdapat dua bentuk pernyataan yaitu pernyataan positif yang berfungsi untuk mengukur sikap positif, dan pernyataan negative yang berfungsi untuk mengukur sikap negative objek sikap.

Skor pernyataan positif dimulai dari 1 untuk sangat tidak setuju (STS), 2 untuk tidak setuju (TS), 3 untuk ragu-ragu (R), 4 untuk setuju (S), dan 5 untuk sangat setuju (SS). Skor pernyataan negative dimulai dari 1 untuk sangat setuju (SS), 2 untuk setuju (S), 3 untuk ragu-ragu (R), 4 untuk tidak setuju (TS), dan 5 untuk sangat tidak setuju (STS). Beberapa peneliti menghilangkan option "ragu-ragu" dalam instrument penelitian untuk memudahkan peneliti melihat sikap sesungguhnya sesuai angket yang responden isikan. Sehingga, skala likert merupakan skala untuk evaluasi suatu kegiatan yang telah dijalankan sebelumnya.